

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Mahrus. 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Alkotsar, Artijo. 2000, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arkunto, Suharsni. 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta.
- Barnett, Randy E. 1998, *The Structure of Liberty, Justice and the Rule of Law*, Oxford University of Press, Oxford.
- Chazawi, Adami. 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Danil, Elwi. 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Depatemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Direktorat Hukum dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.
- El-Muhtaj, Madja. 2012, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

- Fajar, Mukti., Yulianto Acmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Philip M. 2020, *Korupsi, Pemilu, dan Sumber Daya Alam Problem dan Tantangan di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2012, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Edisi Revisi), Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husein, Yunus. 2019, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, PSHK Indonesia, Jakarta.
- Indrayana, Denny. 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang.
- Issa, Asriana. dkk, 2011, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta
- Joseph, Sarah dan Adam McBeth. 2010, *Research Handbook on International Human Rights Law*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Morris, Clarence. 1979, *The Great Legal Philosopher*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Muladi. 2005, "*Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*", Refika Aditama, Bandung
- Nasution, Adnan Buyung. 2007, *Arus Pemikiran Konstitualisme. Hukum dan Peradilan*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta
- Pramono, R. Widyo. 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Putra, Nyoman Serikat. 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Reksodiputro, Mardjono. 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Uniiversitas Indonesia, Jakarta
- Remmelink, Jan. 2003, *Hukum Pidana, Komentaar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Pudanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Singleton, Tommie W. dan Aaron J., 2010, “*Fraud Auditing and Forensic Accounting*”, Jon Wiley & Sons Inc, New Jersey
- Soekanto, Soerjono. 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cetakan ke 8) Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, (Cetakan ke 19) Rajawali Press, Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto. 2009, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi 4. Rajawali Pres, Jakarta
- Sujatmoko, Andrey. 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis. 1992, *Filsafat Kebudayaan Politik dan Butir-Butir Pemikiran Kritis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis. 1995, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofi*, Gramedia, Jakarta
- Sutedi, Adrian. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zen, A. Patra M. 2021, *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik atas Harta Kekayaan dalam Perkara Pidana*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Hukum Nasional Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003, (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 534

Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana

2. Hukum Nasional Amerika
Civil Asset Forfeiture Refrom Act, 18 U.S.C. § 981 (2000)

c. Konvensi Internasional

1988 *UN General Assembly Resolutions Tables*

Human Rights Committee, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (article 7), General Comment 29, State of Emergency

Universal Declaration of Human Rights

United Nations, Convention Against Corruption, 2003

d. Penulisan Akhir

Malsela, Ari Juni. 2022, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengadili Perkara Keberatan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Mengenai Perampasan Aset”, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Martono, Sigit. 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Sehubungan dengan Penyitaan dan Perampasan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi no. 39/PID.SUS TPK 2013/PN/JKT.PST)”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok.

Satrio, Hangkoso. 2012, “Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.1454K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok.

e. Jurnal

Ali, Mahrus. “Pendekatan HAM Pada Sistem Pemidanaan dan Putusan Perkara Korupsi”, *Journal VeJ*, Vol. 6, No. 1, (Maret:2020)

- Amin, Muhammad Nur. “Perlawanan Terhadap Perampasan Aset yang Disita dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vo. 9, No. 2, (Juni:2023)
- Anita, Fitri. “Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana”, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, (Desember:2021)
- Ansori, Lutri, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, (Desember:2017)
- Ibrahim, Muhammad Nur. “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi”, *e Jurnal Katalogis*, Volume 4, Nomor 5, Mei 2016.
- Irawadi, Nanang. “Execution of Confiscated Goods Measures of Corruption Which Is Not According To The Value of State Lasses in West Sumatra Hight Prosecutor’s Office”, *Jurnal UNES Law Review* Volume I, Nomor 3, Maret 2019.
- Ma’aruf, Umar. Budaya Hukum dan Watak Bangsa, *Jurnal Hukum*, Vol.16, No. 1 (Maret:2006), hlm. 1
- Maiti & Bidinger, “Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume. 9, Nomor 53, 1981.
- Manan, Bagir & Susi Dwi. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, *Padjajaran Journal of Law*, Vol. 3, No. 3, (2016),
- Nurhana. “Penjelasan Hukum tentang Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”, *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1, (Januari:2021)
- Peranto, Olsen. “Itikad Baik’ Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020, Perlukah Dipermasalahan?”, *Jurnal Rechtsvinding*, Desember: 2020.
- Rochman, Dessy. “Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 24, Agustus 2016.
- Sahputra, Nanda. Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Putusan

Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2 (Agustus:2017)

Warjiyati, Sri. “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Justicia Islamica*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017.

Wibowo, Widyanti. “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurist Diction* Volume 4, Nomor 5, Agustus 2020.

Wijaya, Daya Negri. Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol.1, No.2 (Desember:2016)

Wiyona, R. 2016, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 150-151

Worrall, John L “Civil Asset Forfeiture Reform Act 2000: a sheep in wolf’s clothing?”, *An International Journal of Police Strategies and Management* Vol. 27, No. 2, (Juni:2004)

Zulfan. Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke, Dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial, *Serambi Akademika*, Vol. 6, No. 2, (November:2018)

F. Internet

Abdul Halim Barkatullah, “Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Hukum” diunggah pada 17 Februari 2014 diakses pada <http://eprints.ulm.ac.id/138/> 29 Mei 2023

Adrian F. “Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Beritikad Baik Perlu Dioerkuat”, diunggah pada 6 April 2021, diakses pada <https://peradi.org/post/perlindungan-terhadap-pihak-ketiga-beriktikad-baik-perlu-diperkuat4380> 2 Maret 2023

Ambaranie Nadya, “Datangi KPK, Ayu Azhari Tanyakan Kejelasan Kasus yang Melibatkannya” diunggah pada 7 September 2015, diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/07/17460641/Datangi.KPK.Ayu.Azhari.Tanyakan.Kejelasan.Kasus.yang.Melibatkannya>

Boyke ledy, “Pakar: Perampasan Aset Pihak ketiga Jangan Melanggar Ketentuan Hukum”, diakses pada

<https://www.antaranews.com/berita/2022609/pakar-perampasan-aset-pihak-ketiga-jangan-melanggar-ketentuan-hukum> diunggah pada 2 Maret 2021.

Brief For The Unites States As Amicus Curiae Supporting Petitioner, Anita Alvarez v. Chermane Smith, et al. No. 08-531 diakses <https://www.justice.gov/osg/brief/alvarez-v-smith-amicus-merits> diunggah pada

Girli Ron, 2020, “Implementasi UNCAC dalam kerangka Hukum Positif Indonesia”, <https://kumparan.com/girli-ron-mahayunan/implementasi-uncac-dalam-kerangka-hukum-positif-indonesia-1u5nF7kqhkQ/3> diunggah pada 30 Agustus 2022.

Heru Susetyo, “Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perampasan Aset Tipikor”, <http://hukumonline.com/berita/a/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beritikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-lt610bb4999544a/> diunggah pada 5 Agustus 2021

Moh. Mahfud MD, “Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia”, diunggah pada 22 Juli 2020 diakses pada [https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_KONSTITUSIONALISM-E-MK%20\(Prof.Mahfud%20MD\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_KONSTITUSIONALISM-E-MK%20(Prof.Mahfud%20MD).pdf) 18 Januari 2023

Syahrizal Sidik, “Skandal Jiwasraya: Negara Rugi 16,8T, Aset Sitaan Rp. 18,4T” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200921145035-17-188250/skandal-jiwasraya-negara-rugi-rp168-t-aset-sitaan-rp184-t> Diunggah Pada 23 September 2020

Satrio Widiyanto, “Pengamat Nilai Perampasan Aset Tak Terkait Kasus Korupsi Melanggar HAM”, diunggah pada 31 Juli 2021, diakses pada <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012308884/pengamat-nilai-perampasan-aset-tak-terkait-kasus-korupsi-melanggar-ham> 9 Februari 2022

“The Civil Asset Forfeiture Act of 2000: Legislative History” Hearing Before the Committee on the Judiciary House of Representative One Hundred Fourth Coongress 2nd Session on H.R. 1916 Serial No. 94 diakses pada <https://www.justice.gov/criminal-mlars/file/1042296/> 17 Maret 2023

U.S. Supreme Court, Alvarez v. Smith, 558 U.S. 87 (2009) Case Summary, diakses pada https://www.lawpipe.com/U.S.-Supreme-Court/Alvarez_v_Smith.html